

BAB II

PERMASALAHAN THAAD DAN IMPLIKASI *THREE NOS* BAGI CINA DAN KOREA SELATAN

Pada Bab 1 telah dipaparkan mengenai permasalahan THAAD yang berujung pada boikot terhadap klaster industri budaya Korea Selatan di Cina. Bab ini berusaha meningkatkan pemahaman pembaca mengenai pokok permasalahan yang dituliskan di latar belakang, sekaligus menjadi pengantar lanjutan untuk bab selanjutnya. Bab ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu perluasan isu dari permasalahan THAAD, dampak permasalahan THAAD bagi Korea Selatan dan Cina, serta implikasi *Three NOs* bagi Cina dan Korea Selatan.

2.1 Permasalahan THAAD: Perluasan Isu Keamanan Menjadi Isu Ekonomi

Isu THAAD menyebabkan suasana hubungan yang tidak baik antara Cina dan Korea Selatan. Cina telah berulang kali menyatakan penolakan melalui pernyataan pemerintah maupun oleh media-media dalam negeri. Cina telah secara konsisten menunjukkan ketidaksetujuannya sejak Februari 2016 saat Korea Selatan dan AS memulai pembicaraan formal mengenai pemasangan THAAD. Adapun yang menjadi alasan penolakan Cina antara lain: Radar X-band THAAD melemahkan sistem penangkis nuklir Cina; THAAD hanya memberikan pertahanan minimal terhadap misil Korea Utara sehingga tentu saja ini menargetkan Cina; THAAD menyebabkan instabilitas Semenanjung Korea dan akan menciptakan perlombaan senjata di tingkat regional; serta THAAD ditujukan untuk membatasi *power* Cina di tingkat regional sebagaimana pemasangan THAAD adalah bagian dari strategi AS untuk menambah pengaruhnya di wilayah Asia Timur, di samping mengurangi pengaruh Cina (Meick & Salidjanova 2017, h. 5-6).

Seiring memanasnya hubungan kedua negara, mulai terjadi aksi boikot terhadap klaster industri budaya Korea Selatan di Cina. Hal ini kemudian

menyebabkan isu meluas yang tadinya hanya isu keamanan menjadi isu ekonomi. Meskipun aksi boikot merupakan bentuk pemanfaatan momentum permasalahan THAAD, Cina juga memiliki motif lain di balik tindakan tersebut. Berdasarkan penelitian Kwon, Kim dan Kang (2017), tindakan Cina juga didasari motif ekonomi. Cina berubah menjadi protektif seiring industri budayanya yang sedang berkembang pesat. Cina ingin berfokus pada pengembangan dan pertumbuhan industri budayanya sendiri, terutama setelah Cina memiliki modal sebagai pihak yang mendominasi distribusi konten budaya di pasar global karena *merger & acquisition* (M&A) yang agresif. Padahal di saat yang sama, industri budaya Korea sedang menguasai pasar Cina. Maka Cina memanfaatkan ketegangan diplomatik yang terjadi untuk melindungi industri budayanya sendiri. Cina berusaha mengambil alih pasar domestik yang besar sekaligus melakukan ekspansi ke luar negeri.

Saat terjadi aksi boikot terhadap klaster industri budaya Korea Selatan di Cina, segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya Korea (*Hallyu*) dilarang di industri hiburan Cina. Tidak ada bintang Korea Selatan yang diijinkan tampil di program hiburan Cina, begitu pula program Korea di televisi Cina. Itu berarti tidak ada C-drama yang dibintangi oleh aktor atau aktris Korea, termasuk K-drama dan K-pop di televisi Cina. Pemerintah tidak memberi izin konser-konser K-pop, bahkan selebriti Korea disingkirkan dari iklan-iklan di Cina.

Menanggapi berita seputar boikot di Cina, Wakil Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, Woo Tae Hee, mengatakan bahwa sampai Juli 2016 setelah pengumuman pemasangan THAAD, tidak ada perubahan hubungan antara Korea Selatan dan Cina. Tapi pihaknya berusaha meminimalisir dampak secepatnya dan mengamati respon Cina (Hankyung 2016). Demikian pula dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yun Byung Se, yang mengatakan “Whenever difficulties and challenges arise in South Korea-China relations, we should not over-react” (Epoch Times 2016). Pihak Cina juga memberi pendapat. Dalam konferensi pers hari Senin 21 November 2016, Geng Shuang sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tidak pernah mendengar tentang

larangan terhadap Korea. Cina selalu positif terhadap pertukaran budaya dan *people-to-people* dengan Korea Selatan. Namun demikian, pertukaran hanya dapat terjadi apabila ada dukungan publik (FMPRC 2016b). Ini seakan menunjukkan bahwa boikot yang terjadi merupakan keputusan publik.

Aksi boikot di Cina memang merupakan keputusan publik. Namun pemerintah Cina juga turut berperan dengan tidak menghentikan boikot dan juga melakukan dukungan di belakang layar. Boikot banyak dipropagandakan di media online, misal Global Times –media di bawah naungan Partai Komunis Cina, mengatakan di editorialnya, “We don't have to make the country bleed, but we'd better make it hurt.” (Global Times 2017). Berbagi poling tentang boikot juga dibuat untuk menarik opini publik. Xinhua –media resmi pemerintah Cina, mengadakan *survey* yang hasilnya lebih dari empat perlima masyarakat Cina akan mendukung larangan terhadap bintang-bintang Korea Selatan di program TV Cina jika pemerintah melakukannya. Lebih lanjut, Xinhua mengklaim bahwa aksi boikot “reflects Chinese placing love for their home country before popularity of entertainment stars” (Liu 2016).

Boikot yang dilakukan Cina terhadap Korea Selatan bukanlah kali pertama terjadi. Boikot telah berulang kali digunakan Cina dalam menanggapi suatu peristiwa atau kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingannya. Pada tahun 2010, Cina berhenti mengimpor salmon asal Norwegia sebagai tanggapan karena Komite Nobel Norwegia memberi penghargaan Nobel Peace Prize kepada Liu Xiaobo yang merupakan kritikus sastra Cina dan pembangkang politik. Cina juga melakukan retaliasi ekonomi terhadap Jepang pada tahun 2010 dan 2012 karena sengketa Kepulauan Diaoyu / Senkaku. Secara berurutan, Cina menghentikan impor mineral langka dari Jepang dan menguatkan sentimen anti Jepang. Lebih lanjut, Cina memasukkan buah impor asal Filipina ke dalam karantina karena kebuntuan sengketa Laut Cina Selatan pada tahun 2012. Pada tahun 2016, Cina membatalkan *senior level talks* dan memberi *fee* impor tambahan terhadap Mongolia karena kunjungan Dalai Lama –pemimpin spiritual Tibet yang dikucilkan, ke negara tersebut. Kemudian di tahun yang sama,

pemerintah Cina melarang kunjungan turis ke Taiwan pasca terpilihnya Presiden Tsai Ing Wen yang tidak pro Cina (Fuchs & Klann 2013; Heilmann 2015; Meick & Salidjanova 2017).

Akibat semakin meningkatnya dampak boikot yang terjadi di Cina, Wakil Menteri Perdagangan, Woo Tae Hee, mengubah pernyataannya yang semula membantah adanya perubahan hubungan Korea-Cina. Pada pertemuan satuan tugas terkait isu perdagangan antara Korea-Cina tanggal 17 Januari 2017, Wakil Menteri Woo menyatakan, “we will continue to object to the Chinese measures”. Namun demikian, pihaknya juga mengatakan akan tetap berhubungan dengan Cina melalui saluran dialog dibawah FTA kedua negara (Yonhap 2017a).

Menteri Luar Negeri Yun Byung Se juga mengubah pernyataannya terkait tindakan boikot Cina. Pada 5 Maret 2017, Menteri Yun mengatakan bahwa rangkaian retaliasi ekonomi yang dilakukan Cina terhadap Korea berpotensi melanggar hukum perdagangan internasional dan pakta bilateral. Dalam penampilannya di program berita KBS, dirinya mengatakan, “(They could) likely be in breach of the rules of the World Trade Organization (WTO) and the bilateral free trade agreement between South Korea and China”. Lebih lanjut, Yun mengatakan, “in general, it seems there have been such (retaliatory) measures, but officially the Chinese government is denying (its role behind them)” dan “it is not desirable to place a man-made obstacle to this kind of people exchange”. Menteri Yun mengatakan sedang mendalami tindakan yang dilakukan Cina, jika perlu membawanya ke pengadilan internasional. Dirinya juga mengklaim telah memperingatkan Cina untuk mengatasi situasi (Yonhap 2017b).

2.2 Dampak Permasalahan THAAD bagi Korea Selatan dan Cina

Permasalahan THAAD tidak hanya membuat hubungan kedua negara memanas, namun juga menciptakan efek kurang baik bagi klaster industri budaya Korea Selatan yang terkena boikot. Dampak aksi boikot pertama kali dirasakan oleh perusahaan-perusahaan penyiaran Korea Selatan dengan adanya penurunan impor konten budaya Korea di Cina. Kepala Departemen Drama KBS, MBC, dan

SBS yang merupakan stasiun penyiaran publik utama (secara berurutan Jung Sung Hyo, Jang Geun Soo, dan Kim Yeong Seob) kemudian melakukan pertemuan pada akhir Januari 2017 untuk membicarakan peraturan *60-minute* terkait drama. Peraturan ini dibuat dalam rangka mengurangi kompetisi rating dan merevitalisasi pasar yang stagnan. Caranya adalah menutup kerugian melalui pengurangan biaya pekerja dan produksi, serta meningkatkan penempatan jeda komersial dengan memotong episode (Kim, 2017).

Jeda komersial di tengah episode harganya lebih mahal daripada jika ditayangkan di awal dan akhir drama. Pada mulanya peraturan tersebut mendapat komplain dari penonton yang merasa terganggu, akan tetapi alternatif meningkatkan pendapatan dengan cara ini menjadi populer. Peraturan *60-minute* akhirnya diterapkan oleh MBC dan SBS. Misal dalam slot Rabu-Kamis pukul 22.00 yang merupakan *prime time* penayangan drama. Sejak drama “Ruler: Master of the Mask” yang tayang pada 10 Mei-13 Juli 2017, durasi tayang drama MBC menjadi 35 menit per episode dengan dua episode ditayangkan per harinya. Kemudian di stasiun SBS, peraturan tersebut mulai berjalan pada drama “Suspicious Partner” yang juga tayang pada 10 Mei 2017-13 Juli 2017.⁹

Selain dialami perusahaan penyiaran Korea Selatan, dampak turut dialami langsung oleh individu-individu yang memiliki proyek di Cina. Hal ini terutama dialami oleh pekerja industri budaya asal Korea Selatan yang menjadi subjek pemecatan ataupun ketidakpastian karena boikot. Misal dalam proyek C-drama sebagai berikut:¹⁰

⁹ Berdasarkan pengamatan penulis di aplikasi Viu dan situs Asianwiki.

¹⁰ Berdasarkan hasil konfirmasi penulis dari Daftar 53 C-Drama yang Terdampak boikot *Hallyu* dalam situs Sohu. Penulis mencocokkan profil drama-drama tersebut di situs My Drama List.

Tabel 2.1 Status C-Drama yang Melibatkan Aktor dan Aktris Korea Selatan Saat Terjadi Permasalahan THAAD

No	Judul	Aktor/Aktris Korea yang Terlibat	Status Penayangan
1	Jade Lovers	Lee Jong Suk	Ditunda hingga Desember 2018
2	Mr. Right	Ji Chang Wook	Ditunda (telah tayang mulai 12 Januari 2018)
3	Endless August	Rain	Ditunda hingga Desember 2020
4	Undercover	Shin Min Hee	Pemeran diganti
5	Memory Lost	Lee Geon Ju	Pemeran diganti
6	Shuttle Love Millenium	Yoo In Na	Pemeran diganti
7	Graduation Season	Krystal Jung	Ditunda hingga Desember 2020
8	New Sea	Jang Hyuk	Ditunda
9	Castle in the Time	Park Min Young	Ditunda hingga Desember 2020
10	Braveness of the Ming	Park Min Young	Ditunda hingga Desember 2020
11	The Legendary Tycoon	Gu Hye Seon	Pemeran diganti
12	Bound at First Sight	Lee Hyun Woo	Ditunda
13	Happiness Chocolate	Clara Lee	Ditunda (telah tayang mulai 14 Mei 2018)
14	The Rhapsody of a Summer Dream	Go Joon Hee	Ditunda hingga Desember 2020
15	The Fox's Summer	Kim Tae Hwan	Pemeran diganti
16	Gorgeous Workers	Choo Ja Hyun	Ditunda
17	Love Express	Joo Won	Ditunda hingga Desember 2020
18	The Song	Nathan Lee	Ditunda hingga Desember 2018
19	Lover's Lies	Jung Il Woo	Pemeran diganti
20	Beautiful Woman	Jung Il Woo	Ditunda hingga Desember 2018
21	Honey, I'm Sorry	Joo Jin Mo	Ditunda hingga Desember 2018
22	My Goddess, My Mother	Lee Da Hae	Ditunda hingga Desember 2018
23	Love Returns	Kwon Sang Woo	Ditunda
24	The Left Ear	Han Chae Young	Ditunda hingga Desember

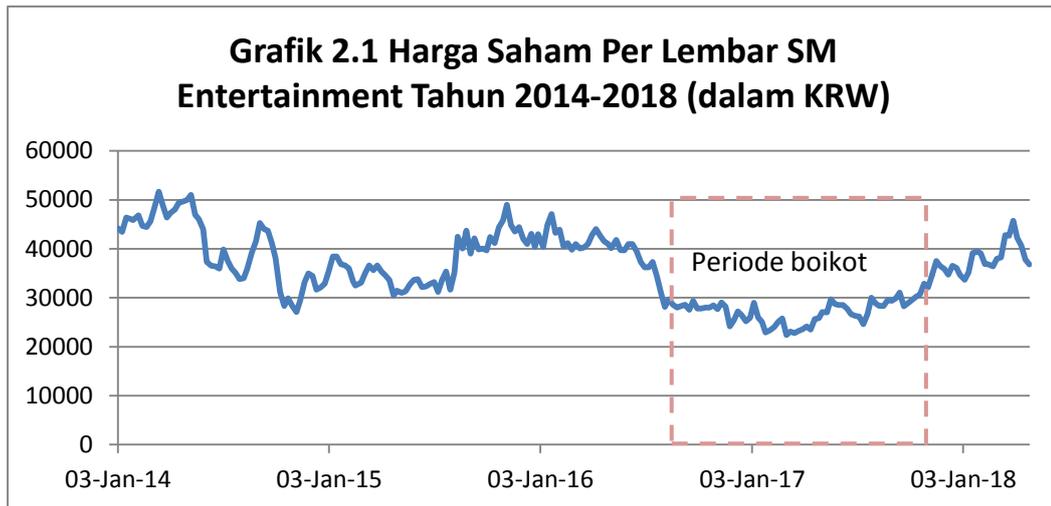
			2018
25	Billion Dollar Heir	Choi Siwon	Ditunda hingga Desember 2020
26	The Great Calligraphy Master Wang Xizhi	Kim Tae Hee	Ditunda hingga Desember 2018
27	Chong Er's Preach	Han Chae Young	Ditunda hingga Desember 2018
28	Once Loved You, Distressed Forever	Jang Dong Gun	Ditunda hingga Mei 2020
29	Popcorn	Park Hae Jin	Ditunda
30	Secret Society of Men - Friends	Park Hae Jin	Ditunda
31	Full House	Eli Kim	Ditunda hingga Desember 2018
32	Circle of Friends	Kang Ta	Ditunda hingga Desember 2020

Sumber: Sohu (2017), My Drama List (2016-2017)

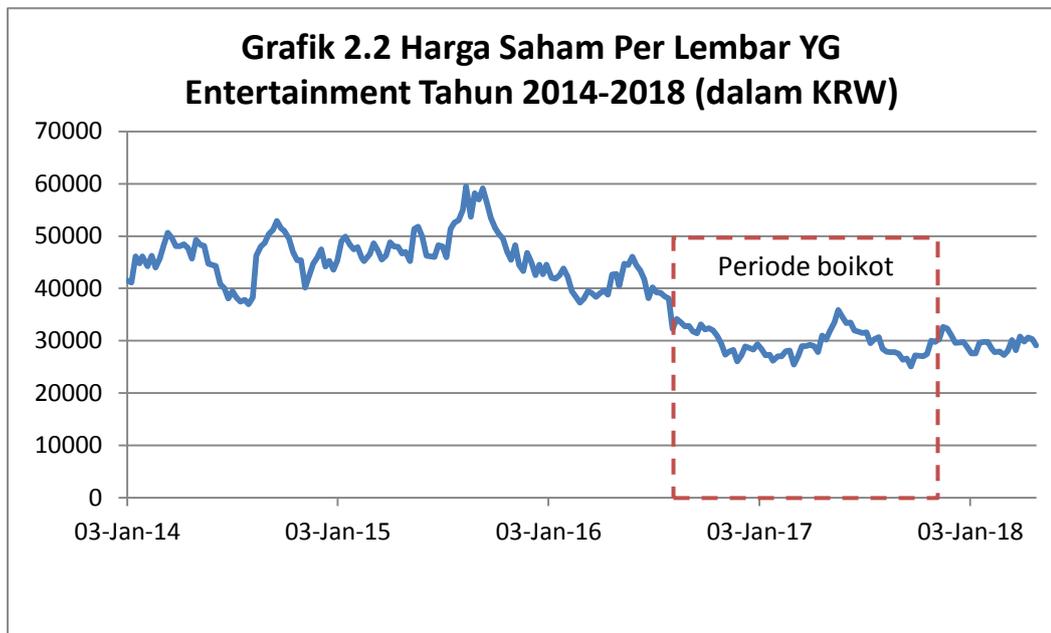
Akibat peraturan boikot yang dikeluarkan oleh SAPPRFT tentang larangan bintang *Hallyu* memiliki aktivitas on air di Cina, produksi C-drama yang melibatkan selebriti Korea mengalami kendala. Peraturan yang mulai berlaku 1 Agustus 2016 ini menyebabkan para produser drama Cina harus memilih antara mengganti pemeran asal Korea Selatan atau menunda penayangan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.

Drama Lee Jong Suk bersama aktris Cina yang berjudul “Jade Lovers” sudah sampai tahap mengeluarkan *trailer* ke publik pada Januari 2017, namun mengalami penundaan penayangan hingga waktu yang belum ditentukan. Selanjutnya C-drama “Love Weaves Through A Millenium 2” yang mengalami pergantian pemeran. Peran utama seharusnya adalah aktris Korea Selatan Yoo In Na, namun pada akhirnya drama tersebut tayang pada 9 Oktober-5 Desember 2017 dengan aktris Cina menggantikan peran Yoo In Na (Son 2016a). Hal ini juga dialami oleh Gu Hye Sun dalam drama “The Legendary Tycoon”. Gu Hye Sun dipecat dari drama Cina “The Legendary Tycoon” padahal syuting telah selesai sejak 1 Januari 2016. Sebagai gantinya, fokus beralih ke peran dua wanita lain yang diperankan aktris Cina Joe Chen dan Song Yi (Anne 2017).

Dampak boikot dirasakan pula oleh perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan di bidang hiburan yang memiliki banyak kegiatan di Cina. Nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut turun drastis seperti yang dialami oleh SM dan YG Entertainment sebagai berikut:



Sumber: Google Finance



Sumber: Google Finance

Nilai saham kedua perusahaan mengalami penurunan tajam mulai Agustus 2016 (Lihat Grafik 2.1 dan 2.2). Pada 5 Agustus 2016, nilai saham SM Entertainment turun drastis menjadi 28.150 KRW per lembar, sedangkan nilai saham YG

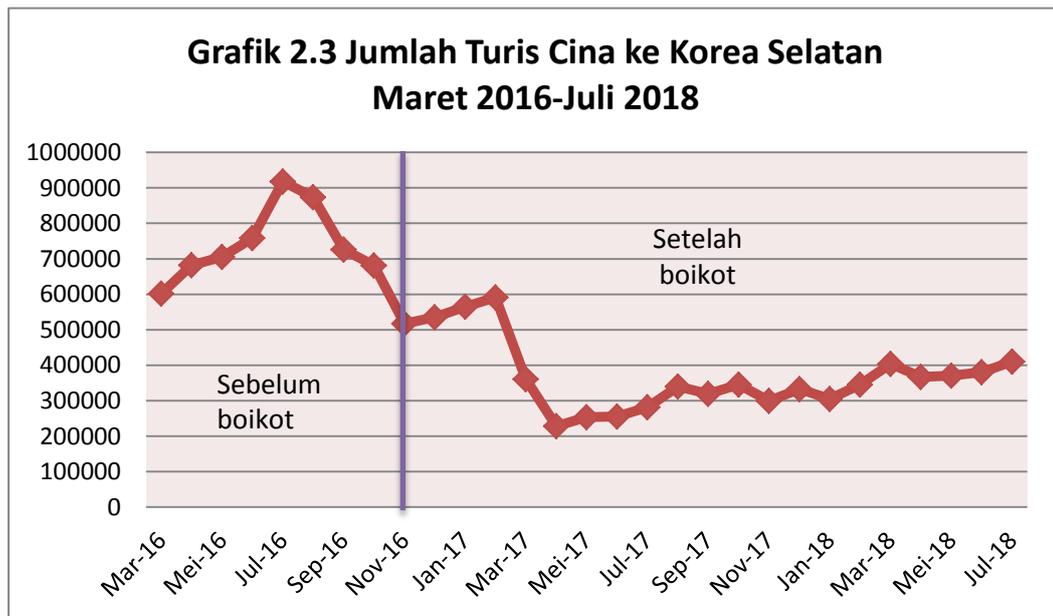
Entertainment menjadi 32.250 KRW. Rata-rata nilai saham tersebut tetap rendah hingga akhir 2017 jika dibanding masa sebelum terjadi boikot.

Tidak hanya agensi besar, manajemen King Kong by Starship yang menaungi Lee Kwang Soo, Kim Beom dan Kim Ji Won yang populer di Cina mengatakan pihaknya mengalami penurunan penjualan dalam paruh kedua tahun 2016. Hal ini karena terjadi penurunan profit dari dunia hiburan Cina dan pasar iklan yang hilang sejak Oktober 2016 ketika Cina melarang pelaku dunia hiburan Korea untuk bekerja disana. Lee Jin Seong sebagai pimpinan King Kong by Starship mengatakan “The company has earned not a penny from China due to the political row over THAAD. We did occasionally receive inquiries for advertisements until the end of last year but no contract was actually signed.” (Shim 2017).

Komponen lain yang terkena dampak adalah dunia perfilman. Tidak ada film maupun pekerja seni Korea yang berpartisipasi pada perhelatan *Beijing International Film Festival (BJIFF)* ke-7. Tidak ada film Korea yang diputar pada acara yang berlangsung tanggal 16-23 April 2017 tersebut. Berdasarkan Arirang (dalam Chosun 2017), dari 500 film dari seluruh dunia yang diputar, tidak satupun berasal dari Korea Selatan. Sentimen anti Korea tidak hanya ditunjukkan pada BJIFF 2017. Lebih lanjut, tidak ada satupun film Korea yang diputar di bioskop Cina sejak isu THAAD pada tahun 2016. Padahal hingga tahun 2015, Cina yang merupakan pasar film terbesar kedua di dunia ini setidaknya dapat memutar tiga hingga empat film Korea meskipun ada penerapan kuota.

Dampak boikot akibat THAAD juga dirasakan oleh industri pariwisata. Berdasarkan data *National Assembly's Budget Office (NABO)* Korea Selatan, bidang pariwisata Korea Selatan mengalami kerugian hingga 7,5 triliun won periode Januari hingga September 2017 karena penurunan pengunjung dari Cina. Secara spesifik, industri ritel mengalami penurunan penjualan hingga 4,9 triliun won dan industri perjalanan mengalami penurunan penjualan hingga 1,1 triliun won (Yonhap 2017e).

Berbagai tindakan Cina seperti mempersulit visa bisnis hingga melarang program tur ke Korea Selatan turut menyebabkan kemerosotan jumlah turis Cina yang berkunjung ke Korea Selatan, seperti yang terlihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: Korean Tourism Organization

Terlihat sejak muncul instruksi pengurangan turis ke Korea Selatan (Oktober 2016), jumlah turis mengalami penurunan signifikan menjadi 516.956 orang pada November 2016. Kemudian saat larangan diperketat pada Maret 2017, jumlah turis Cina yang berkunjung ke Korea Selatan turun drastis menjadi 360.782 orang dan 227.811 pada April 2017. Jika dibandingkan dengan jumlah turis pada Maret dan April 2016, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu secara berurutan -40% dan -66,6%. Pertumbuhan negatif mulai berakhir pada Maret 2018 setelah Cina secara bertahap menghentikan larangan wisata ke Korea Selatan. Meski demikian, jumlah kunjungan turis Cina ke Korea Selatan tetap rendah jika dibandingkan sebelum terjadi boikot.

Sejak muncul berita bahwa mulai Maret 2017 Cina melarang paket tur ke Korea Selatan, beberapa agensi tur Cina seperti Tuniu Corp, Ivmama.com, *China Youth Travel Service* (CYTS) dan Caissa Tongsheng Investment mengatakan

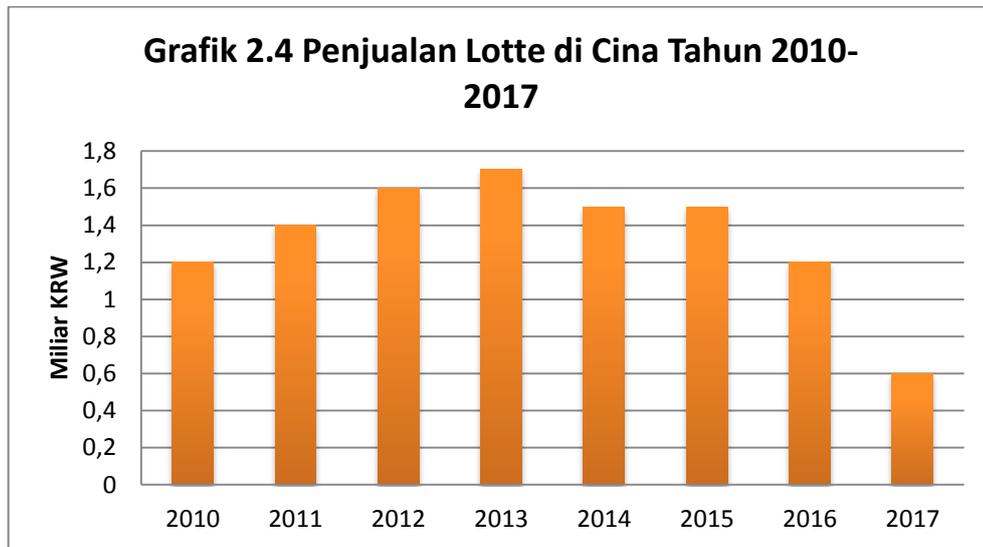
pihaknya telah berhenti menyediakan paket tur ke Korea karena kontroversi THAAD, berikut aplikasi visa (Zhang 2017). Sementara itu ketika terjadi penurunan kunjungan turis Cina ke Korea Selatan, kunjungan turis Cina ke Jepang justru meningkat. Berdasarkan laporan yang dirilis *China Travel Academy* dan *C-trip* tahun 2017, Jepang melesat menjadi urutan kedua sebagai destinasi top bagi turis Cina. Sementara itu, peringkat Korea Selatan terus turun menjadi peringkat 9, terburuk sepanjang sejarah (Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Peringkat Korea Selatan dalam Top 10 Destinasi Turis Asal Cina Tahun 2014-2017

Tahun	Peringkat
2014	2
2015	1
2016	2
2017	9

Sumber: Travel China Guide

Komponen lain yang terkena boikot adalah Lotte yang masih menjadi bagian dari klaster industri budaya. Meski demikian, perusahaan ini terkena boikot juga karena keterlibatannya dengan kesepakatan THAAD pemerintah Korea Selatan. Penjualan Lotte di Cina pada tahun 2017 turun drastis seperti yang ditunjukkan pada grafik:



Sumber: Lotte Annual Report 2010-2017

Terlihat bahwa terjadi penurunan drastis penjualan Lotte di Cina pada tahun 2017, yaitu sekitar 50% dari penjualan dari tahun 2016. Penjualan Lotte pada tahun 2017 sebesar 3,204 triliun KRW, turun dari 8,03 triliun KRW pada tahun 2016 dan 8,033 triliun KRW pada tahun 2015.

Dalam Annual Report 2017 (h. 3), pihak Lotte mengakui bahwa di tahun itu industri ritel Korea Selatan mengalami pertumbuhan stagnan, salah satu penyebabnya adalah isu THAAD. Lotte menyatakan terdapat ketidakpastian bisnis di Cina terhitung sampai 31 Desember 2017. Banyak ritel Lotte di Cina tidak beroperasi karena ditutup oleh otoritas setempat (Lotte 2017). Sebelumnya terdapat 112 gerai Lotte Mart dan lima *department store* di Cina. Namun setelah *deal* THAAD, 87 di antaranya ditutup oleh pemerintah Cina dan sisanya berhenti beroperasi (Yonhap 2017c). CEO Lotte mengungkapkan bahwa Lotte Mart memutuskan menjual tokonya di Cina karena operasinya dihentikan oleh pemerintah Cina sehubungan dengan isu THAAD tahun 2016 (Lotte 2017, h. 9). Meskipun Lotte Mart mengambil langkah tegas untuk menghadapi berbagai tantangan, penjualan Lotte Mart pada tahun 2017 juga turun menjadi 6577,4 miliar KRW (Lotte 2017, h. 65).

Di sisi lain, Cina mendapat keuntungan dari melakukan boikot. Boikot terhadap klaster industri budaya Korea Selatan di Cina berhasil mengurangi keberadaan *Hallyu* di negaranya yang sejalan dengan cita-cita Industri Budaya Cina 2020. Berdasarkan *blueprint* yang dikeluarkan oleh kantor umum Communist Party of China (CPC) dan Dewan Negara, Cina berencana untuk mengembangkan industri budayanya menjadi pilar ekonomi nasional pada tahun 2020 dengan meningkatkan struktur industri, mengembangkan merek-merek utama dan meningkatkan konsumsi. *Blueprint* ini memuat outline program lima tahun ke-13 (2016-2020) tentang pengembangan dan reformasi budaya seperti menetapkan prinsip-prinsip panduan, tujuan utama, kunci proyek, serta dukungan kebijakan untuk reformasi budaya masa depan (Xinhua 2017).

Hal yang dapat disoroti dari cita-cita Industri Budaya Cina tahun 2020 adalah keinginan menjadikan klaster industri budaya sebagai pilar ekonomi, pemanfaatan media online dan memperluas jasa. Ketika Cina melakukan boikot terhadap Korea Selatan, negara tersebut justru tengah melakukan ekspansi budayanya sendiri. Ketiadaan klaster industri budaya Korea Selatan yang menguasai pasar Cina merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi Cina.

2.3 Implikasi *Three NOs* bagi Cina dan Korea Selatan

Permasalahan THAAD diakhiri dengan pernyataan Korea Selatan dan Cina mengenai normalisasi hubungan kedua negara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Cina bersepakat mengenai pentingnya menjaga hubungan baik antara kedua negara. Mereka ingin kembali memperkuat pertukaran dan kerja sama di semua area secepatnya karena dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak (Choi 2017, FMPRC 2017). Kunci dari normalisasi hubungan ada pada kesepakatan *Three NOs* yang mendorong normalisasi hubungan dan upaya kerja sama antara kedua negara. *Three NOs* memiliki dampak yang berbeda bagi kedua negara.

Poin *Three NOs* menjadi kunci yang kemudian meyakinkan Cina untuk mengakhiri tindakan-tindakannya sehubungan dengan THAAD. *Three NOs*

menjawab kekhawatiran Cina bahwa Korea Selatan akan mengubah kondisi *status quo* di Asia Timur. Berikut relevansi *Three NOs* dengan pandangan kebijakan luar negeri Cina:

Tabel 2.2 Pandangan Kebijakan Luar Negeri Cina

	Tradisional Geopolitik	Negara Berkembang	Rising Great Power
Status Internasional	(old) great power	Negara berkembang	Rising great power
Status di Asia Timur Laut	Kompetisi dengan AS untuk dominasi	Kerja sama dengan AS tapi kompetisi dengan Jepang untuk hegemoni regional	Kompetisi dengan AS untuk status setara di kawasan / dunia
Hubungan dengan AS	Kompetitif	Kooperatif	Hedging dan soft balancing
Kata kunci	Geopolitik / buffer zone	Kapasitas tersembunyi dan menunggu waktu (tao guang yang hui)	Rajin mengambil tindakan yang dibutuhkan (fen fa you wei)
Kebijakan di Semenanjung Korea	Pemulihan pengaruh	Status quo	Status quo dengan potensi perubahan

Sumber: Kim 2017

Terlihat bahwa dalam kacamata Cina sebagai *rising great power*, Cina memiliki kompetisi dengan AS untuk mendapatkan status setara di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina ingin menjaga *status quo* terkait Semenanjung Korea yang itu berarti Cina tidak ingin terjadi perubahan diluar kehendaknya.

Poin *Three NOs* mengenai tidak ada pemasangan THAAD tambahan, tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil AS dan tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral dengan AS dan Jepang yang dikemukakan Korea Selatan menempatkan negara tersebut kembali sejalan dengan cita-cita kebijakan luar negeri Cina. Terlebih meskipun Cina gagal mencegah pemasangan THAAD, Cina mendapatkan sesuatu dari poin *Three NOs*. Cina berhasil menempatkan Korea Selatan di posisi yang tidak terlalu dekat dengan AS.

Apabila Cina dapat cukup puas dengan akhir permasalahan THAAD, Korea Selatan bukanlah pihak yang patut berbangga dengan hal tersebut. Menyepakati *Three NOs* berarti Korea Selatan harus kembali mengubah pandangan terhadap keamanannya sendiri agar sesuai dengan keinginan Cina. Lebih lanjut, Korea Selatan harus meninjau kembali rencana kerja sama keamanannya dengan AS dan Jepang.

Wacana kerja sama keamanan trilateral antara AS-Jepang-ROK muncul sejak nuklir Korea Utara semakin menjadi. Bentuk-bentuk kerja sama antara lain pertemuan antara petinggi-petinggi negara hingga latihan gabungan. Pertemuan antara kepala staf gabungan ketiga negara telah diadakan lima kali sejak Juli 2014. Kemudian angkatan laut Korea Selatan, Jepang, dan AS telah melakukan latihan peringatan rudal bersama sebanyak lima kali sejak Juni 2016. Lebih lanjut, setiap tahun ketiga negara mengadakan latihan pencarian dan penyelamatan bersama (disebut SAREX). Alasan untuk semua kegiatan tersebut memang adalah provokasi Korea Utara. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerja sama ini termotivasi oleh kepentingan bersama AS dan Jepang dalam menggabungkan Korea Selatan ke dalam sistem kerja sama militer trilateral untuk melawan kebangkitan militer Tiongkok (Park 2017).

Ketika menyepakati *Three NOs*, Korea Selatan tentu mengetahui resiko yang akan terjadi. Korea Selatan akan semakin terhimpit dalam kepentingan AS, Jepang dan Cina. Beberapa kali Korea Selatan meminta latihan militer bersama dibatalkan sejak Korea Selatan melakukan normalisasi hubungan dengan Cina. Pada November 2017, Korea Selatan membatalkan latihan militer gabungan dengan AS dan Jepang (Hiroshi 2017). Kemudian pada Mei 2018, Korea Selatan meminta latihan militer bersama “Blue Lightning” yang seharusnya melibatkan *American B-52 strategic bomber* dibatalkan (Yi & Park 2018). Pada akhirnya, menyepakati *Three NOs* semakin menempatkan Korea Selatan di posisi sulit.

Permasalahan THAAD yang semula adalah isu keamanan meluas menjadi isu ekonomi setelah Cina melakukan aksi boikot terhadap klaster industri budaya

Korea Selatan. Cina telah mendapat keuntungan dari saat dimulai sampai diakhirinya boikot. Sementara itu, Korea Selatan kurang mampu memaksimalkan keuntungannya. Pernyataan normalisasi hubungan kedua negara juga memberikan perolehan yang berbeda antara Cina dan Korea Selatan. Cina terlihat lebih banyak memperoleh keuntungan, terutama dengan adanya *Three NOs*. Oleh karena itu bab selanjutnya akan membahas strategi yang dilakukan Korea Selatan dan hal-hal yang menjadi pertimbangan negara tersebut sehingga menyepakati poin *Three NOs*.